

Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa

Oleh Sajogyo



Pelapisan di pedesaan

Sejak 1910 Boeke¹ mengemukakan adanya perbedaan mendasar antara tujuan-tujuan kegiatan ekonomi di Barat dan di Timur. Ada dorongan kuat untuk "keperluan ekonomi" di satu pihak, dan pengutamaan "keperluan sosial" di lain pihak. Percuma berusaha memasukkan teknologi dan kelembagaan moderen dari Barat ke pedesaan Indonesia; lebih tepat mempertahankan pola lama perekonomian desa, katanya. Pemikiran ini disebut "dualisme statis"; apa yang baik untuk sektor moderen belum tentu baik pula untuk sektor tradisionil, maka waspadalah dalam membina hubungan antara keduanya.

Geertz² dengan menelusuri sejarah penjajahan, menunjukkan bahwa kekuasaan penjajah dan kemudian juga teknologi baru dan modal yang dibawanya telah memiskinkan penduduk pedesaan Jawa dan dalam proses itu masyarakat petani Jawa telah menjadi statis. Dia membantah Boeke yang menyatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena kestatisan orang desa di Jawa. Sejarah Jawa yang diuraikan Geertz juga menggambarkan bahwa surplus pertanian hasil keringat petani Jawalah yang memungkinkan perekonomian di Negeri Belanda berkembang pesat di abad yang lalu. Kenyataan ini adalah kebalikan dari usaha memisahkan dua dunia Barat dan Timur di Hindia-Belanda.

Geertz menggambarkan dua tipe bentuk hubungan antara "unsur luar" dan desa tradisionil dalam proses itu, berdasar konsepsi "ekologi kebudayaan". Di Jawa terjadi simbiosis yang bercorak "mutualistik" antara pola pertanian pada sawah (petani) dan pola perkebunan tebu (perusahaan besar pabrik gula) yang menyewa sawah dan tenaga kerja petani. Akibatnya dinilai "baik" untuk masing-masing pihak. Di Sumatera Utara (Deli) terjadi "toleransi" antara peladang pribumi dan perkebunan besar tembakau yang memilih pola berladang berpindah-pindah juga. Akibatnya bagi tiap pihak tidak nyata merugikan atau menguntungkan. Sebenarnya sebutan "simbiosis" yang saling menguntungkan antara pola petani padi sawah dan pola pabrik gula tebu di Jawa patut dipertanyakan juga, jika hasilnya nyata-nyata telah membuat miskin masyarakat pedesaan, juga dalam arti bahwa "sistem pedesaan" Jawa telah dipaksa untuk selalu menyesuaikan diri tanpa "boleh berubah secara hakiki". Dalam proses itu pola pertanian sawah telah ter-involusi, menemui "jalan buntu", dengan produktivitas (hasil per orang-hari) yang tak naik lagi (di sekitar 1 kg beras per jam-orang) karena banyaknya tenaga kerja yang tertampung di sawah, yaitu lebih dari 200 orang-hari per hektar dengan sebagian besar menarik tenaga buruh tani upahan pada luas usaha lebih dari 0,5 ha.

Yang kemudian ramai diperdebatkan orang adalah sebutan "kemiskinan yang terbagi" (*shared poverty*) yang menurut Geertz menjadi ciri hubungan sosial ekonomi antara

1 J.H. Boeke, *Economie van Indonesie*, (Haarlem: Willinck, 1951).

2 C. Geertz, *Involusi Pertanian*, (Jakarta: Bhratara, 1976).

petani dan warga sedesa. Walaupun tanah kurang merata terbagi di desa Jawa (tapi lebih merata dibanding daerah lain di Asia yang padat penduduk) peluang bekerja di dalam pertanian terbuka agak luas. Dalam hal ini Geertz khilaf jika menggambarkan masyarakat pedesaan di Jawa masih bercorak "homogen". Sebenarnya sumber data yang relevan dari masa awal abad ini di Jawa sudah dikutipnya tapi tanpa memberinya tafsiran yang sepadan. Menurut penelitian "kemakmuran yang menurun di pedesaan Jawa" tahun 1905³ lapisan bawah petani (31%) waktu itu menguasai rata-rata 0,27 ha, lapisan menengah (41%) 0,63 ha dan lapisan atas (28%) seluas 2,2 ha. Usahatani lapisan menengah dan atas (69%) seluas rata-rata 1,26 ha dapat dibandingkan dengan usahatani sesempit 0,27 ha saja pada lapisan petani gurem yang 31%.

Apa yang terjadi setelah 70 tahun berlalu dalam hal penguasaan tanah di pedesaan Jawa? Penduduk telah berkembang hampir tiga kali dan luas tanah pertanian antara 2 dan 3 kalinya keadaan 1905. Sensus Pertanian 1973 memberi gambaran bahwa petani lapisan atas (lebih dari 1 ha) maupun lapisan menengah (antara 0,5 dan 1 ha) secara relatif telah berkurang besarnya, berturut-turut 17% rumah tangga (rata-rata 1,8 ha) dan 24% (rata-rata 0,7 ha) atau jika disatukan menjadi sebesar 41% dengan luas rata-rata 1,16 ha. Petani lapisan bawah (kurang dari 0,5 ha) telah membesar menjadi 59% dengan luas rata-rata 0,25 ha. Mengenai besarnya golongan yang tak bertanah belum ada sumber data yang lebih pasti: hanya diketahui bahwa golongan ini juga sudah makin nyata di pedesaan. Golongan rumah tangga bukan-petani di pedesaan Jawa kini sudah "lebih dari 30%" dan se Jawa (desa dan kota) diduga sudah atau sedang melampaui angka 50%.

Dengan mengikuti proses "revolusi pupuk pabrik" di pedesaan Jawa sejak 1960, arti pelapisan dalam penguasaan tanah itu dapat dibaca lebih jelas. Dalam jangka waktu 1960 - 1973 beragam program Bimas padi

sawah telah dikembangkan oleh pemerintah. Sesuai dengan arti "bimbingan massal" untuk pertama kali kredit murah, bibit unggul, pupuk dan lain sarana disediakan kepada ratusan ribu sampai jutaan petani. Politik ekonomi sejak 1967 mendasarkan diri pada pentahapan pembangunan jangka panjang. Pertanian diharapkan menjadi "sektor pemula" dengan surplus produksi pangan dan hasil bumi ekspor, maka perlu dibantu agar mampu menerima teknologi baru yang lebih unggul bahkan kelembagaan baru koperasi.

Usaha menjadikan sektor pertanian pangan di Jawa suatu sektor komersil memang berhasil pada petani lapisan atas dan menengah tapi petani gurem, lapisan bawah, tertinggal. Penjelasan dapat dicari pada sifat susunan masyarakat desa; gambaran pelapisan itu bukan hanya suatu penggolongan "kelas statistik", melainkan punya arti sosiologis. Lebih-lebih petani lapisan atas (menurut ukuran di Jawa "petani luas" tapi di mata Bank Dunia tergolong *small farmers*, rata-rata 1,2 ha saja) yang serba lebih dalam hal-hal lain dibanding dengan petani lapisan lain.

H. Suwardi⁴ yang meneliti petani di 8 desa di Jawa Barat mencirikan lapisan atas yang sepertiga jumlahnya sebagai orang-orang moderen; dengan motivasi dan empati tinggi dan fatalisme kurang mereka punya jaringan hubungan lebih luas, termasuk dengan unsur-unsur "atas desa". Dengan usahatani yang lebih luas dan menerima banyak unsur teknologi pertanian baru, dengan memperhatikan segi pemasaran pula dan hidup hemat, investasi mereka dalam usaha mencari nafkah juga lebih besar.

Jika menurut gambaran Boeke garis batas antara dunia ekonomi Barat dan desa tradisional terletak antara "kota" (atau "perkebunan besar") dan "desa", boleh dikatakan garis batas itu sudah beralih ke tengah-tengah masyarakat desa: petani lapisan atas telah tercakup unsur "kota". (Proses ini bagi lapisan petani di atas itu belumlah selesai!). Sebaliknya, lapisan petani gurem (kurang dari 0,5 ha) yang paling lemah dalam hal

3 Onderzoek Mindere Welvaart der Inlandse Bevolking of Java/Madura, Jilid V.a Landbouw, bagian 1, (Batavia: Van Dorp, 1908), hal. 264 dan seterusnya.

4 H. Suwardi, *Response Masyarakat Desa terhadap Modernisasi Produksi Pertanian di Jawa Barat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977).

modal kerja justru lebih sering tak terjangkau oleh pelayanan Program Bimas. Sebaliknya, mereka juga kurang mampu menjangkau Bimas itu, misalnya jika sudah terikat hutang musiman pada peminjam uang atau beras yang sering adalah petani lapisan atas atau tokoh lain yang bermodal.

Membandingkan penghasilan petani pemilik tanah dengan buruhtani secara sederhana dapat dilakukan berdasar data Survei Pertanian (BPS, 1970/71 atau lain tahun). Dari usaha padi sawah satu hektar di Jawa petani pemilik tanah dari satu musim mendapat hasil bersih 1,1 ton beras (hasil kotor 1,6 beras): berarti 6 kg beras sehari selama 6 bulan musim tersebut. Buruhtani mendapat upah sebesar 13,7% hasil kotor, sama dengan 1,5 kg beras sehari. Hanya tak jelas berapa orang buruhtani terlibat dan selama berapa hari-kerja. Dengan menunjuk pada tingkat upah yang rendah itu, lebih tepat ciri "kemiskinan bersama" dikenakan pada golongan buruhtani yang sebagian berasal dari lapisan petani gurem itu, sebagian dari mereka yang tak bertanah sama sekali. Karena jumlah mereka ini makin banyak selama masa 50 tahun ini, di dalam bersaing memperoleh peluang bekerja pada petani lapisan atas itu, kemiskinanlah yang mereka pikul bersama.

Peluang sewa hanya terbuka bagi petani yang punya modal (misalnya, dari usaha di luar pertanian), sedangkan peluang menyakap (bagi-hasil) sepotong sawah dari petani luas atau cukup telah makin sempit. Dalam masa 1963 - 1973 (antara dua sensus pertanian) makin banyak pemilik tanah, apalagi pemilik sawah, yang mengusahakan sendiri usahatani. Nampak pula gejala bahwa "ngepak" (atau "ngedok") menggantikan lembaga bagihasil. Dalam hal "ngepak" petani pemilik tanah adalah pengelola dan buruh "ngepak" tinggal melakukan beberapa tahap pekerjaan di sawah, dengan mendapat imbalan, sambil berhak mengikuti panen, sebesar seperempat atau seperlima hasil. Membandingkan imbalan "ngepak" dengan pasaran upah buruhtani lepas agaknya "ngepak" sering masih dinilai lebih menarik, antara lain karena hasil berupa padi. (Lain dari sewa dan bagihasil, hal "ngepak" ini tak tercantum dalam Sensus Pertanian!).

Dalam hal pekerjaan panen padi, dengan makin meluasnya adat "menebaskan" padi kepada pedagang, petani lapisan atas makin jelas menunjukkan sikap komersilnya dalam usahatani sawah. Demikian pula mereka menerima *huller* untuk memberaskan panen padi, sambil meninggalkan cara menumbuk padi oleh banyak tenaga wanita yang dinilai lebih mahal. Semua itu pertanda bahwa hubungan "bapak-pengikut" (antara petani luas dan petani gurem atau buruhtani yang tergantung pada peluang bekerja) makin melemah. Tapi, sekali lagi, proses ini belum selesai: jumlah buruhtani upahan yang diterima dalam usahatani padi sawah di Jawa masih tinggi selama peluang memakai traktor kecil masih perkecualian. Jika "involusi pertanian" ada yang menilai sebagai "hambatan", di lain pihak selama di luar pertanian peluang bekerja masih terbatas pola "padat-karya" pada usahatani padi sawah adalah "alat penolong" yang tak ternilai besar artinya dalam masyarakat yang padat penduduk dan kurang bermodal.

Pola nafkah yang berganda

Konsep "angkatan kerja" (perorangan 10 tahun lebih), antara lain disertai perincian atas beragam "bidang nafkah" (*industry*), status dalam pekerjaan, dan sebagainya untuk tujuan-tujuan tertentu perencanaan perkembangan sosial ekonomi mungkin masih berguna. Konsep tersebut tetap diikuti oleh Biro Pusat Statistik.

Khususnya dalam memahami lebih baik pola hidup lapisan masyarakat yang paling lemah di pedesaan, diperlukan perincian atas keragaman pola nafkah menurut kesatuan rumahtangga. Baru tahun 1978 ini ragam data yang dikumpulkan Survei Sosial Ekonomi oleh BPS akan memenuhi banyak keperluan analisa data yang dimaksud, sekaligus mencakup segi-segi pengeluaran rumahtangga, alokasi tenaga dalam mencari nafkah dan penghasilan perorangan maupun rumahtangga walaupun yang terakhir ini baru mencakup penghasilan pertanian saja.

Untuk menjelaskan jenis data yang diperlukan berikut ini dikutip sebagian data yang dikumpulkan oleh Survei Agro-Ekonomi

(Bogor) dari 6 desa di beberapa kabupaten di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Jawa Barat, di mana lapisan bawah (I) adalah rumahtangga yang menguasai kurang dari 0,25 ha atau tak bertanah (sebesar 49%), lapisan berikut (II) yang menguasai "antara 0,25 dan 0,5 ha" (sebesar 23%) dan lapisan atas (III) "lebih dari 0,5 ha" (sebesar 28%).⁵

kemukakan data untuk tiap musim, bukan digabung dan dirata-ratakan saja. Selama suatu lapisan di pedesaan kita masih mengenal "musim paceklik", selama itu kita belum bebas dari kemiskinan!

Dua penelitian lain yang lebih kecil, terbatas salah satu desa tapi mengikuti pencatatan sepanjang tahun (tiap minggu/bulan) atas sampel kecil menunjukkan bahwa

POLA NAFKAH YANG BERGANDA PADA TIGA LAPISAN DI PEDESAAN, DAS CIMANUK, JAWA BARAT

Lapisan	1. Usahatani			2. Buruh-tani	3. Da-gang	4. Kera-jinan	5. Jasa	(Total)
	a) padi (%)	b) bukan padi (%)	(a+b) (%)					
I (49%)	15	9	(24)	37	17	7	15	(100)
II (23%)	36	19	(55)	16	11	5	12	(100)
III (28%)	59	18	(76)	5	7	2	10	(100)

Makin luas usahatani, makin besar (%) penghasilan rumahtangga dari pertanian. Jika batas 50% dipilih, hanya rumahtangga dari lapisan II dan III yang boleh disebut "petani" (lebih dari 0,25 ha). Dan rumahtangga lapisan I (kurang dari 0,25 ha/tak bertanah) lebih tepat disebut rumahtangga "buruhtani" karena itulah sumber utama mereka. Bagi lapisan inilah tiga bidang usaha lain punya arti terbesar dibandingkan dengan rumahtangga yang menguasai lebih dari 0,25 ha, yaitu "dagang", "jasa-jasa" dan paling kecil "kerajinan". Menurut ukuran tiga (tahap) "garis kemiskinan", lapisan I masih tergolong "miskin sekali" (penghasilan setara dengan 188 kg beras/tahun/orang), lapisan II tergolong ("miskin") (setara dengan 246 kg beras/tahun/orang) dan hanya lapisan III yang mencapai "cukup" (setara dengan 408 kg beras/tahun/orang).⁶ (Perkiraan angka rata-rata grup sedesa sampel). Karena data tersebut dikumpulkan dari dua musim (1975/76 dan 1976) sebenarnya lebih baik jika di-

berfaedah pula menambahkan satu jenis kegiatan lain yang terutama penting artinya bagi rumahtangga miskin di pedesaan Jawa, yaitu "mencari pangan dan lain keperluan dari alam bebas". Sedangkan dalam usaha mencari nafkah itu perlu juga memperhatikan berapa waktu dihabiskan dalam menuju ke tempat mencari nafkah itu dan kembali di rumah (di desa antara 11-12% waktu dan di luar desa antara 15-18% waktu bekerja).⁷

Lebih lengkap lagi jika dapat mencatat berapa waktu dicurahkan anggota rumahtangga untuk beragam "pekerjaan rumahtangga" (memasak, mencuci, dan sebagainya) dan berapa sumbangan anak-anak di atas 6 tahun dalam tiap kegiatan itu, baik yang menghasilkan sesuatu hasil (mencari kayu bakar, rumput untuk kambing, dan sebagainya) maupun membantu pekerjaan rumahtangga. Di dalam rumahtangga miskin anak yang cepat ditarik dalam beragam kegiatan tersebut, dapat berakibat banyaknya "gugur dari sekolah di SD". ("bebas dari SPP di SD" barulah sebagian dari proses mengatasi masalah itu).

Dari satu desa di Yogyakarta, penelitian White (1976)⁸ membanding penghasilan seseorang per jam kerja, dalam usahatani

5 Makali *et al.*, "Penghasilan buruhtani" (konsep laporan, (Bogor: Survey Agro-Ekonomi, 1977).

6 Untuk rumahtangga di pedesaan penghasilan di bawah "senilai 180 kg beras per tahun/orang" adalah "paling miskin", "antara 180 kg dan 240 kg beras/tahun/orang" adalah "miskin sekali" dan "antara 240 kg dan 320 kg beras/tahun/orang" adalah "miskin". Kecukupan pangan dipastikan "di atas 320 kg".

7 G. Hart, "Patterns of Household Labor Allocation in Javanese Village", (Bogor: SAE, 1977).

8 B. White, "Population, Involution and Employ-

sendiri dan usaha lain-lain. Jika dari usaha sawah diterima setinggi (senilai) 1 kg beras/jam, dari pekarangan 0,5 kg beras/jam, lebih kecil lagi hasil dari ternak: terbesar dari bebek (antara 0,1 dan 0,2 kg nilai beras/jam), terkecil dari kambing (antara 0,02 dan 0,04 kg beras/jam). Menyolok sekali bahwa dari lain-lain usaha imbalannya umumnya lebih rendah dari pekerjaan usahatani. Dalam berburuhtani imbalan terendah dari menanam padi (0,12 kg beras/jam), lebih tinggi dari menyiangi atau mencangkul (antara 0,18 kg dan 0,22 kg beras/jam) dan paling tinggi dari upah panen (antara 0,3 kg dan 0,4 kg beras/jam) dalam hal wanita sedangkan dari membajak dengan ternak milik sendiri laki-laki memperoleh imbalan lebih tinggi lagi: antara 1,4 kg dan 1,8 kilogram beras/jam. Hal terakhir menunjukkan bahwa dengan modal lebih besar orang dapat mencapai taraf imbalan lebih tinggi.

Dari usaha dagang kecil bermodal senilai 20 kg beras, seorang wanita mencapai imbalan 0,2 kg beras/jam, seorang laki-laki 0,3 kg/jam. Dalam hal kerajinan imbalan terendah diperoleh dari membuat anyaman tikar (wanita), serendah 0,03 kg beras/jam sedangkan dari membuat "kepang" (anyaman bambu) laki-laki mendapatkan dua kalinya. Membuat gula Jawa (dari kelapa) juga termasuk pekerjaan tekun dan lama (8 jam sehari) dengan imbalan hanya 0,1 kg/jam. Jika diambil dari pohon kelapa yang dibagi hasil (bukan milik) imbalan juga separuhnya saja.

Di dalam pola berganda mencari nafkah itu pembagian kerja antara anggota rumah-tangga dibina seluwes mungkin: jelas ukuran satuan produksi maupun konsumsi mesti dikenakan pada "rumah-tangga", tak cukup hanya menelaah prestasi kerja perorangan pria atau wanita. Di desa penelitian di Yogyakarta itu bahkan jelas ada juga pengaruh status rumah-tangga⁹ dalam pekerjaan panen padi sawah ada unsur hubungan timbal-balik di mana pemilik sawah

relatif luas mendapat imbalan lebih tinggi atas dasar saling mengundang dalam pekerjaan panen di sawah masing-masing antara rumah-tangga yang selapisan. Dari rendahnya imbalan bekerja di luar pertanian jelas sifat perekonomian desa di mana orang yang kurang mampu telah terpaksa menambah penghasilan itu. Mereka yang bermodal dan lebih luas tanahnya punya pilihan di samping dapat menanamkan kembali ke dalam usahatani yang makin bermodal, dapat pula memilih usaha lain, juga usaha bermodal. Bahkan mungkin juga dalam hal ini ada yang berarti usaha di luar pedesaan, yaitu usaha dilingkungan kota. Ada hasil Sensus Industri, 1974/75 (BPS) yang patut diketengahkan di sini karena memberikan data yang meluas (sampel besar) yang dapat dibandingkan dengan hasil penelitian mendalam di salah satu desa. Dari lima jilid mengenai "kerajinan/industri rumah" dapat diambil kesimpulan penting mengenai: a. keragaman jenis kerajinan yang terbanyak dilakukan dengan taksiran "nilai tambah" (yang ini memberi petunjuk besarnya penghasilan per orang/hari); b. arti industri perumahan pedesaan yang belum pernah dikemukakan sebelumnya.

Data tersebut menyatakan bahwa dua jenis kerajinan yang paling rendah "nilai tambahnya" (anyaman dan gula-merah) menyerap 59% tenaga (orang-hari): penghasilan kurang dari 1 kg beras/per orang-hari. Yang paling besar tingkat nilai tambahnya (lebih dari 4 kg beras/orang-hari) menyerap 8,6% tenaga kerja, terbagi dalam 5 jenis kerajinan dari empat kelompok: dari penggilangan padi, pembuatan alat rumah-tangga dari kayu, pembuatan bata dari tanah liat, barang dari logam dan "kerajinan lain". Kecuali perlu keterampilan lebih, juga besarnya modal agaknya ikut menentukan tingginya penghasilan. Beragam jenis kerajinan tekstil tergolong rendah imbalannya, antara 1 dan 2 kg beras/per orang-hari. Dibanding dengan itu nilai tambah pembuatan makanan (kecuali gula merah) lebih tinggi imbalannya (antara 2 dan 3 kg beras/per orang-hari). Secara ringkas: untuk 68,6% tenaga yang terserap imbalan (nilai tambah) kurang dari 2 kg beras/per orang-

ment in rural Java", *Development and Change*, (The Hague: ISS, 1976).

9 A. Stoler, "Struktur kelas dan otonomi wanita di pedesaan di Jawa", *Masyarakat Indonesia*, Tahun IV, no. 1-2, 199. hal. 85-110.

KERAGAMAN JENIS KERAJINAN, MENURUT BANYAKNYA ORANG-HARI YANG TERSERAP DAN
BESARNYA NILAI TAMBAH, DI PEDESAAN JAWA, 1974/1975

(angka: % jumlah orang-hari terserap)	Nilai tambah (setara kg beras per orang-hari)				
Jenis kerajinan	kurang dari 1,0 kg	1,0-1,9 kg	2,0-2,9 kg	3,0-3,9 kg	lebih dari 4,0 kg
	%	%	%	%	%
Makanan:					
1. gula merah	29,1	—	—	—	—
2. tahu-tempe	—	—	7,9	—	—
3. kerupuk	—	—	2,1	—	—
4. makanan lain	—	—	2,7	—	—
5. penggilingan padi	—	—	—	—	1,2
Barang kayu, rotan, bambu, dan sebagainya:					
1. anyaman bambu, dan sebagainya	30,1	—	—	—	—
2. alat rumah tangga, kayu	—	—	—	—	1,7
Pertenunan, konfeksi:					
1. pembatik	—	3,8	—	—	—
2. pemintalan tali	—	1,5	—	—	—
3. pertenunan	—	0,9	—	—	—
4. tekstil jadi	—	—	0,7	—	—
Barang tanah liat, logam, dan sebagainya:					
1. genteng	—	—	3,9	—	—
2. bata	—	—	—	—	1,9
3. barang lain dari tanah liat	—	1,6	—	—	—
4. barang dari logam	—	—	—	—	0,9
5. barang lain	—	1,7	—	—	—
Kerajinan lain	—	—	—	—	2,9
Jumlah	59,1	9,5	17,4	—	8,6

hari, untuk 17,4% tenaga imbalan itu antara 2 kg dan 3 kg beras/per orang-hari dan hanya untuk 8,6% tenaga imbalan itu lebih dari 4 kg beras/per orang-hari.

Di pedesaan Jawa selama satu tahun 1974/75 telah terserap 2,9 juta orang oleh kerajinan itu, terbagi atas 928.000 satuan usaha à 3,2 orang. Hanya 5% tenaga berupa buruh bayaran dari luar rumah tangga sendiri. Jelas itu merupakan industri rumah tangga! Orang sebanyak itu telah bekerja rata-rata selama 118 hari dalam setahun, atau rata-rata selama 10 hari dalam sebulan, dengan penghasilan (= nilai tambah) rata-rata senilai 1,7 kg beras/per orang-hari.

Untuk memenuhi penghasilan minimum senilai 4 kg beras sehari bagi rumah tangga sebesar 4,5 jiwa, (agar paling tidak mencukupi pangan), suatu rumah tangga umumnya tak dapat hidup dari satu jenis kerajinan saja.

Sebelum data "industri kecil" (tenaga 5-10 orang) dari Sensus Industri 1974/75 di-

umumkan oleh BPS, kita hanya dapat menarik kesimpulan dari data survei "industri kecil/kerajinan" (sejak 1970) yang tak memisahkan keduanya. Data sumber ini memberikan petunjuk bahwa dalam masa 1970-73 arti dua bidang ini menurun tajam: nilai produk bruto turun 35% dan besarnya nilai tambah 40% (jika memperhatikan harga beras) sedangkan tenaga kerja yang terserap menurun "hanya" dengan 12% yang berarti imbalan per orang juga menurun.

Dalam masa 3 tahun itu bidang "makanan" tetap bidang terpenting (menyerap lebih dari sepertiga tenaga), bidang "barang dari kayu, rotan" bertambah penting (menyerap 39% tenaga, semula 24%) sedang yang menurun adalah bidang "tekstil" (5% tenaga terserap, semula 10%) dan "lain-lain bidang" (tinggal 21% tenaga, semula 28%, jumlah satuan usaha tinggal 16%, semula 29%). Karena sumber data tersebut tak mencatat jumlah orang-hari, maka tak dapat diperkirakan nilai tambah per orang-hari;

pada bidang apa saja terjadi penurunan dan pada bidang apa terjadi kenaikan, jika ada. Sampai di mana perubahan itu merupakan akibat dari majunya industri besar dan sedang (yang dimasuki PMA dan PMDN) masih memerlukan penelaahan lebih lanjut, mengingat potensi persaingan antar pasar hasil masing-masing, tapi juga potensi kaitan dan saling dukung antara keduanya, industri besar/sedang di satu pihak, dan industri kecil/kerajinan di lain pihak.

Yang sangat menarik juga dari hasil Sensus Industri 1974/1975 adalah adanya satu jilid khusus yang memberi data tentang industri perumahan selama tahun 1973-74. Sayang, tanpa keterangan mana yang di kota, mana yang di desa. Untuk Jawa, tercatat perbaikan pada 43% rumah, (nilai Rp. 9.300 per satuan) perombakan pada 4% rumah (nilai Rp. 50.200 per satuan), perluasan pada 1% rumah (nilai Rp. 85.000 per satuan), sedang pendirian rumah baru untuk tempat tinggal (kategori IV yang termurah di buat pemilik sendiri senilai Rp. 130.000 per satuan) mencapai 1 juta satuan dalam setahun. Jika perbaikan rumah dianggap telah dilakukan sendiri oleh penghuni, 3 jenis industri rumah yang lain memerlukan sejumlah pembo-rong, dan buruh bayaran dari sektor informal yang mencapai nilai Rp. 489 milyar atau hampir empat kali nilai seluruh kerajinan di Jawa.

Tanpa data nilai tambah dan jumlah orang-hari yang terserap dalam industri rumah itu, kita hanya dapat menduga bahwa dalam setahun ada 7 juta orang di Jawa bekerja di dalam 3 jenis industri rumah tersebut selama 116 hari. (Sejumlah asumsi, bahwa nilai tambah sama dengan "kerajinan" yaitu 38% dan per orang-hari senilai 2,5 kg beras atau 50% lebih tinggi daripada kerajinan dan banyaknya hari kerja setahun sama, perlu dicek oleh ahli bangunan). Menurut dugaan itu industri perumahan yang tergolong sektor informal di Jawa menyerap 2,5 kali tenaga kerja dalam kerajinan. Sampai mana taksiran ini benar dan tak terlalu tinggi? Hal yang mesti membuat kita ragu-ragu adalah angka taksiran "populasi" jumlah bangunan di Indonesia, yang dalam jilid V itu disebut: 97 juta satuan untuk tahun 1973, dan 71 juta satuan pada tahun

1974. Padahal pada pendaftaran rumah tahun 1970 sebelum Sensus Penduduk di Indonesia baru tercatat hampir 24 juta bangunan. (Keraguan serupa juga dialami jika melihat angka "luas tanah pertanian" di Indonesia yang dihasilkan oleh Sensus Pertanian 1963 ataupun 1973 dengan angka jauh lebih rendah dari lain-lain sumber pelaporan).

Data tentang industri perumahan tadi dike-mukakan agar bidang itu mendapat penelaahan lebih besar. Papan (wisma) adalah salah satu keperluan pokok: dalam pertumbuhan jumlah penduduk kita yang berlipat dua dalam waktu dekat kecuali pangan, rumah adalah barang yang akan banyak diperlukan, sekaligus juga merupakan bidang industri yang memerlukan banyak tenaga kerja. Pada sebagian penting industri perumahan yang tergolong sektor informal banyak tenaga kerja baru dapat masuk dengan mudah: orang dapat belajar sesuatu keterampilan (pertukangan) sambil bekerja.

Mengenai bidang-bidang lain yang di pedesaan penting artinya masih terlalu sedikit data tersedia. Dalam hal "dagang kecil" di pedesaan yang mulai digarap lewat KUD dengan "kredit candak-kulak" (belum ada Rp. 5 milyar dalam 2 tahun ini, rata-rata Rp. 3.000/orang) sambil berjalan, penilaian manfaat kredit tersebut juga dapat menghasilkan data yang diperlukan. Begitu pula "pengangkutan" sebagai bidang mencari nafkah, masih memerlukan penelaahan. Pentingnya bidang ini dikemukakan oleh Hugo¹⁰ yang meneliti migran sementara (dari desa ke kota) di Jawa Barat: sejumlah 66% golongan migran tersebut memasuki sektor informal di kota, antara lain 41% memasuki usaha dagang dan 16% pengangkutan! Dalam rangka ini industri alat pengangkutan penting artinya untuk menghasilkan (dan merawat) misalnya sepeda (termasuk yang beroda tiga untuk barang) dan gerobak dengan ban karet, kecuali alat bermotor yang memerlukan modal jauh lebih besar.

10 G. Hugo: "Circular Migration", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. XIII, no. 3, Nov. (Canberra: ANU, 1977), hal. 65.

Penguasaan tanah, diteropong lebih luas

Uraian di muka dalam menelaah kesempatan bekerja di pedesaan tak dapat tidak, mengaitkan hubungan antara pedesaan dan kota, dalam beragam pasaran, yaitu pasaran hasil, tenagakerja, modal, sarana produksi dan pengetahuan, termasuk teknologi baru.

Pola penguasaan tanah sebetulnya kurang lengkap jika digambarkan secara terpisah, hanya menyangkut apa yang pernah disebut "pertanian rakyat" dan menyangkut tanah pertanian yang dikuasai oleh warga desa, dengan penggolongan petani menurut dua atau tiga lapisan. (Dalam hal lapisan ini kami cenderung untuk lebih memperhatikan secara khusus lapisan "di bawah 0,25 ha" di pedesaan Jawa, sebagai lapisan yang praktis belum terjangkau!)

tor" pertanian itu di Jawa, khususnya dalam arti peluang bekerja? Perkebunan besar di Jawa menyerap seperempat juta tenaga tetap, termasuk 176.000 tenaga di lapangan (kebun) dan pada separuh (56%) jumlah perkebunan juga menarik tenaga kerja musiman dan borongan, yang ditaksir dalam setahun mencapai 910 ribu orang (atas dasar 100 hari kerja dalam setahun) atau lebih dari 5 kali tenagakerja sendiri di lapangan. Mengenai tingkat hidup (tinggi rendahnya upah) bagi buruh musiman pada perkebunan besar ini sedikit saja yang diketahui orang awam, yang paling tahu adalah para pengontrak pekerjaan yang mengerahkan buruh. Konon, golongan buruh tersebut praktis masih "di luar hukum" dan ada juga terlibat tenagakerja anak-anak di bawah ketentuan umur.

Hubungan lain yang menjadi sorotan selama Repelita II adalah dalam hal perke-

TANAH PERTANIAN (ARTI LUAS) DI JAWA

Luas tanah:	Dalam desa 5,5 juta ha			Perkebunan besar 0,65 juta ha		Hutan Negara 3 juta ha	
	Lapisan			Perkebunan Negara	Perkebunan lain	Produksi (1,7 juta ha)	Lain-lain (1,3 juta ha)
	I	II	III				
Luas usaha:	1/4 ha	7/10 ha	1 8/10	1.750 ha	480 ha	17.000 ha	?
Jumlah satuan usaha	5,2 juta	2,1 juta	2,5 juta	244	529	100(?)	?
	Jumlah: 8,8 juta rumah tangga petani)						

Menurut Sensus Pertanian 1973 di desa-desa di Jawa, tanah seluas 5,5 juta hektar diusahakan oleh 8,8 juta petani sedang seluas 0,65 juta hektar oleh perkebunan besar, di mana perkebunan negara lebih menonjol (termasuk sejumlah kecil perkebunan modal asing/joint) dengan luas usaha rata-rata 1.750 ha dibanding dengan perkebunan swasta yang lebih kecil-kecil (480 ha rata-rata). Hutan negara meliputi luas 3 juta hektar, termasuk 1,7 juta hutan produksi dan mencakup 0,7 juta hektar "perkebunan besar" jati. (Hutan produksi itu sekarang seluruhnya di bawah PN "Perhutani".) Bagaimana hubungan antara tiga "subsek-

bunan besar tebu: maksud pemerintah untuk beralih dari sistem "pabrik menyewa tanah sawah milik penduduk desa" (dan mengusahakan sendiri tebu itu) ke sistem "tebu rakyat intensifikasi" (TRI). Banyak hambatan dalam prosès peralihan itu sehingga diduga akan memerlukan masa Repelita III untuk penyelesaiannya. Selama itu tampak gejala bahwa petani yang umumnya belum terbiasa bertanam tebu "memindahkan pengusahaan tebu itu kepada petani yang lebih besar" Petani yang "lebih besar" itu diberi nama (oleh penulis) "petani pedagang", "petani pejabat" dan "petani kuat" lainnya yang bermodal besar.

Jikapun koperasi (KUD) atau kelompok petani yang tampil, yang berperan sebagai pengelola adalah ketua kelompok atau KUD "atas nama petani pemilik tanah", yang sebagian bekerja juga sebagai buruh di tanahnya.

Dalam hal "tanah kehutanan" yang di Jawa tergolong "hutan negara", praktek pengelolaannya mirip "perkebunan besar", atas dasar luas tanah per satuan "pemangkuan" yang bahkan lebih besar (rata-rata lebih dari 17.000 ha). Hanya buku Statistik Indonesia (tahunan, terbitan BPS) tak menyebutkan berapa tenagakerja tetap yang bekerja pada subsektor ini. Apalagi mengenai golongan "buruh tumpangsari" yang dikerahkan secara musiman untuk penanaman kembali hutan sambil dibolehkan untuk satu musim bertanam pangan tak ada data diumumkan. Jika hasil kayu jati (dari luas 0,7 juta ha), kini praktis hanya untuk ekspor, hasil kayu jenis lain dan hasil-hasil lainnya adalah untuk konsumsi dalam negeri. Adakah taksiran sampai mana hasil tersebut juga secara langsung dinikmati oleh penduduk pedesaan sendiri yang hidup berbatasan dengan "hutan negara" itu? Perlu dicatat bahwa (kecuali dalam hal jati) pemisahan definitif antara "wewenang desa" dan "wewenang negara" (waktu itu Hindia Belanda) dalam hal "hutan" itu di Jawa terjadi sekitar 60 tahun yang lalu.

Sebenarnya, dari tanah yang dikuasainya sendiri, penduduk pedesaan juga menghasilkan kayu bakar dan kayu bangunan. Di Jawa menurut Sensus Pertanian 1963 sejumlah 52% satuan usaha di desa melaporkan adanya hasil berupa kayu bakar atau kayu bangunan, terbanyak berupa kayu bakar (50% satuan) baru kayu bangunan (23%). Bahkan pada lapisan petani terkecil (di bawah 0,25 ha) ada sebanyak 38% satuan yang memproduksi kayu. Makin luas usahatani, makin banyak yang sanggup menghasilkannya; pada luas "antara 0,75 ha dan 1 ha" ada sebanyak 48% satuan yang memproduksi kayu. Hanya berapa banyak yang dihasilkan (meter kubik) perlu ditelaah dari sumber lain. Baik dalam hal kayu bakar (sumber energi untuk memasak) maupun dalam hal kayu bangunan (termasuk bambu, bahan industri perumahan yang murah)

masalah ini amat penting diperhatikan. Dalam hubungan ini khususnya bagi lapisan paling lemah di pedesaan milik sepotong pekarangan amat besar artinya, juga untuk sumber pangan yang beragam atau sumber uang belanja. Orang desa menabung dalam pekarangannya dan mengelolanya sebagai lumbung, cadangan untuk bertahan. Jika ada sesuatu *landreform* yang masih dapat dilakukan di pedesaan Jawa yang mencakup "pembagian tanah" maka tanah pekaranganlah yang perlu perhatian utama. Sepanjang masih ada keluarga di pedesaan yang tak mendapat bagian dalam proses waris-mewaris menurut adat kekerabatan, diduga mereka dari lapisan paling lemah yang paling memerlukannya, biarpun dalam potongan sesempit 400 meter persegi. Pembagian tanah untuk pekarangan itu terutama dapat diperoleh dari "konversi" tanah umum: misalnya dari tanah bengkok, tanah perkebunan besar atau tanah kehutanan, secara selektif.

Menjajarkan luas tanah yang dikuasai oleh tiga subsektor pertanian di Jawa dalam satu tabel (pertanian di desa, perkebunan besar dan perusahaan hutan) dapat mendorong kita untuk menenpong pula sejarah hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Di abad yang lalu, kekuasaan Hindia Belanda secara langsung menjadikan petani di Jawa produsen untuk negara, dengan menyisihkan 1/5 tanah petani di desa. Setelah 1875 hubungan itu resmi berupa hubungan sewa (untuk tebu: penghasil uang yang utama) tapi tak dapat dipisahkan dari pengaruh itu adalah campur tangan sampai di desa sehingga "tanah komunal desa" melembaga untuk melayani kepentingan asing itu. (Sampai kini pola "glebagan" untuk tebu pabrik—kini milik negara nasional—di beberapa daerah masih dipertahankan juga). Lembaga "tanah bengkok" untuk pejabat pamong desa adalah contoh lain untuk mendukung pengabdian penuh kepala desa kepada pejabat "atas-desa" tanpa biaya negara. Pembukaan daerah perkebunan baru di pegunungan (misalnya untuk sistem tanam paksa kopi, di Priangan atau lain daerah) yang hasilnya untuk ekspor, juga dimungkinkan karena pengorbanan petani

yang dikerahkan dari desa-desa lama. Dan sejak 1875 praktis tanah pegunungan habis terbagi dalam sekian wilayah hak *erfpacht* untuk penanam perintis (*planter* kulit putih). Dengan ruang atau wilayah gerak yang menjadi makin sempit bagi petani di desa Jawa, sambil menghapus secara resmi "sistem tanam kopi", sekitar 1918 secara pasti wilayah hutanpun dibebaskan dari wewenang "desa" dan negara menjadi penanggung jawab tunggal atas "hutan negara". Memandang duapuluh tahun ke depan, dengan penduduk yang bertambah padat (biarpun laju pertumbuhan menurun sampai 1,5% dan lebih rendah), untuk tujuan produksi pangan yang menghasilkan surplus (untuk bukan petani) kita tak dapat lain dari mengandalkan diri pada golongan petani lapisan atas dan menengah (lebih dari 0,5 ha). Dan fungsi apakah yang dapat dipikul oleh petani gurem atau buruhtani? Selama daya serap di bidang nafkah sekunder dan tersier terbatas, bagi golongan tersebut yang punya otot-otot lengan dan kaki yang kuat, dan juga punya daya pikir yang dapat diharapkan, masih ada beberapa fungsi dukungan pada kelestarian pertanian di Jawa yang dapat dipercayakan kepada mereka.

Pertama, penghijauan secara tuntas tanah yang rusak, baik di desa atau di wilayah hutan, disertai usaha membangun teras-teras pengendali erosi. Setelah kemunduran sejak pecah perang Pasifik, bukan main beratnya tugas ini: jika tak berhasil dalam masa hanya 10 tahun, akan sulit dapat ter-tolong. Soal ini, bukan terutama besarnya biaya (kini sudah tersedia sampai mendekati Rp. 40 milyar setahun untuk reboisasi/penghijauan), melainkan soal organisasi: untuk menjamin bahwa bibit pohon nyata tumbuh tak terganggu, hanya ada satu jalan yaitu memberikan kepercayaan kepada golongan petani gurem dan buruhtani dalam kelompok mereka yang juga dapat mengenyam hasil bertanam itu. Dengan melepaskan "sistem tumpangsari" di tanah hutan negara, kepada kelompok-kelompok buruhtani itu diberikan wewenang untuk mengelola (petunjuk teknis tetap disediakan) dan hak memungut hasil, sebagai bagian dari rencana pekerjaan kelompok (bu-

kan perorangan) yang sudah disetujui bersama (KUD, dan sebagainya). Kecuali bagian yang berisi pohon jati (tetap pada negara) lain jenis hutan produksi dapat dialih-tanggakan kepada kelompok-kelompok buruhtani yang dilatih cara mengelola hutan produktif dan juga lestari. Sebagai hasil sampingan barulah terjamin persediaan air di pegunungan, baik untuk air minum maupun untuk irigasi. Akhirnya, ada manfaatnya biaya perbaikan bangunan irigasi besar yang sudah ratusan milyar rupiah: ada cukup air yang dapat dibagi-bagikan.

Pada awal Repelita II diperhitungkan bahwa penghijauan dan usaha lain mengatasi erosi di pegunungan (termasuk menggali parit drainase) akan dapat menyerap sampai hampir 1.000 orang-hari per hektar, tapi dalam kenyataan dengan memilih cara kontraktor yang mengerahkan buruh padat karya tak sampai 100 orang-hari per hektar yang terserap dan sebagian besar bibit setelah ditanam dicabut orang pula.

Peluang kedua untuk pengelolaan bersama dalam kelompok kecil buruhtani adalah urusan irigasi tersier/kwarter sampai pembagian rasi air itu ke tiap petak sawah petani. Jika menggali saluran tersier baru termasuk pekerjaan itu, kelompok itu pula yang memberikan jasa-jasanya. Para petani yang dilayani memberi imbalan jasa kepada mereka (lewat kelompok) dan jika ada dana bantuan dari pemerintah, kepada mereka pula disalurkan. PPPA yang mempersatukan petani untuk mengatur air, begitu pula Darma Tirta dengan fungsi serupa (masing-masing baru dalam tahap percobaan/perintisan) dapat dipandang sebagai kelompok alternatif. Jika petani lapisan atas (seluas 1,2 ha rata-rata) toh sudah terbiasa memakai buruhtani untuk sebagian besar pekerjaan di sawah (istilah "usahatani keluarga"—*family farm*—sudah salah kaprah untuk golongan itu), mungkin sekali pekerjaan mengatur air irigasi pun bisa saja mereka borongkan kepada kelompok buruhtani yang melakukan fungsi itu. (Data kongkrit tentang jumlah tenaga kerja yang dapat diserap per 100 ha luas vak tersier, sayangnya belum dapat disajikan.) Peluang ketiga adalah pemanfaatan hasil penghijauan/reboisasi yang memilih proyek yang cepat menghasilkan (antara lain

pohon Albizia yang setelah 5 tahun menghasilkan kayu bangunan, sebelum itu kayu penjarangan untuk kayu bakar, rumputan untuk ternak, dan sebagainya). Industri kecil dan kerajinan desa sebagian penting akan berupa industri perumahan murah. Dalam pengembangan kemampuan ini (mencakup keterampilan pertukangan) kelompok buruhtani pun dapat berjasa. Jelas untuk sebagian besar penduduk desa jasa-jasa dalam pemugaran dan pendirian rumah murah akan memilih cara kerjasama yang paling sesuai, jauh dari sistem *real estate* atau Perumnas. Dalam rangka ini penting mendudukkan wewenang soal hak tanah, yaitu hak atas tanah pekarangan untuk perumahan sendiri. Pada siapa pun wewenang itu dilimpahkan, dengan berkelompok buruhtani dan lain golongan paling lemah akan mampu melakukan kontrol sosial.

Menelaah beberapa dasar kebijaksanaan

Dalam Inpres Nomor 2, 1978, tentang usaha membina KUD (Koperasi Unit Desa) satu hal pokok yang ditegaskan adalah cara pendekatan kelompok (fasal 8, ayat 3). Untuk dapat menghidupkan satuan organisasi Koperasi yang mencakup penduduk sebesar masyarakat satu kecamatan (di Jawa sudah lebih dari 10.000 rumahtangga di 14 desa rata-rata) cara pendekatan kelompok yang dapat menjamin pertumbuhan dari "taraf akar padi" dengan memanfaatkan ikatan yang sudah ada diantara sejumlah kecil petani, buruhtani, pedagang kecil dan sebagainya karena saling mengenal dan saling percaya. Pemimpin kecil yang mengetuai kelompok 20 sampai 40 orang itu mesti orang di antara mereka sendiri.

Cara pendekatan ini memberi peluang untuk memperjuangkan agar buruhtani dan petani gurem yang merasa senasib (dalam kedudukan lemah) dapat mengembangkan sendiri kelompok yang terdiri dari warga-warga segolongan. Mungkin juga tinggal serukun-tetangga. Pemberian beberapa bidang penting (dari segi pembangunan nasional) untuk digarap kelompok buruhtani tersebut hanya ada artinya jika diberikan oleh pemutus kebijaksanaan ditingkat na-

sional. Sekaligus hal ini memberikan kedudukan terpandang di mata masyarakat desa ataupun kecamatan. Dengan menunaikan fungsi masing-masing (petani mengelola usahatani dan menghasilkan produk padi, buruhtani mengurus air irigasi dan mengelola penghijauan, dan sebagainya) terjadi pula hubungan saling mendukung. Kerjasama antara beragam golongan lewat kelompok itu, dapat menumbuhkan rasa harga diri dan berdiri sama tinggi. Khususnya bagi golongan buruhtani/petani gurem perkembangan sikap ini penting sekali.

Sampai di mana ada peluang daya tembus dalam pemikiran pemegang kebijaksanaan untuk memberi jalan keluar bagi lapisan yang paling lemah di pedesaan kita? Jika tak cukup tanah tersedia bagi golongan tersebut untuk menyambung hidup di Jawa (paling banyak 20% tambahan angkatan kerja dalam setahun yang akan tertarik ke tanah seberang), sektor jasa dan jenis industri mana yang saling dukung dan yang dapat dibukakan untuk mereka? Jasa-jasa itu terbuka peluangnya dalam urusan irigasi dan karya penghijauan/reboisasi yang orang-golongan lain tak ada yang sanggup mengerjakan. Dan dengan melepaskan sebagian dari "usaha negara di bidang produksi kayu" (bukan perkebunan jati yang jangka panjang) dan membina kelompok-kelompok buruhtani itu yang disertai mengelolanya, berapa "ongkos sosial" yang harus dibayar oleh masyarakat? Sebagian petugas/ahli pengelola hutan tetap akan diperlukan sebagai pembina/penasehat teknis (di taraf KUD atau di pusat koperasi, taraf kabupaten atau propinsi), sebagian lain mungkin lebih diperlukan di Kalimantan. Jika bagi mereka yang tak bertanah itu tak dapat disediakan tanah lagi (kecuali berupa pekarangan), marilah kita berikan kepada mereka peluang pekerjaan dengan wewenang dan tanggungjawab yang nyata, sekaligus peluang menikmati hasilnya pula. Selama itu mereka dibina agar mampu mengembangkan kemampuan diri sambil menunaikan tugas mencari nafkah bagi keluarga masing-masing dalam usaha-usaha yang lestari.

Pemikiran yang diajukan tadi mesti akan diuji oleh berbagai segi lain: bagaimana corak tatadesa yang sesuai dan juga mendukung

peluang bagi golongan paling lemah itu?

Bagaimana menyalurkan komunikasi yang berupa dialog berarti dengan golongan-golongan yang beragam di desa? Cukupkah personil aparat pemerintah di tingkat kecamatan untuk memangku peranan pembina yang sanggup duduk sama rendah dengan rakyat yang akan dibina dalam kelompok pilihan mereka sendiri? Sampai di mana kaum pemuda dan terpelajar dapat mem-

berikan tenaga dan pemikiran mereka dalam proses itu? Suatu pemikiran baru yang mirip "kelahiran baru" diperlukan bagi semua unsur pendukung suatu gerakan baru. Visi dan semangat kita nyata pada kaum muda dan tua selama tahun-tahun pertama revolusi dalam menghadapi penjajah yang ingin bercokol kembali. Musuh kita kini adalah kemiskinan pada segolongan dan ketak-acuhan pada golongan lain yang lebih sulit diatasi.

